

ABSTRAK

PENGAWASAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA PT. UNITED TRACTORS OLEH DINAS TENAGA KERJA DKI JAKARTA

Oleh
CITRA RAHMAYANTI

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan cukuplah kompleks, mulai dari pemberhentian kerja yang sepihak, gaji atau upah yang tidak sesuai, pegawai di bawah umur, ketidakbebasan berserikat dan sebagainya. Oleh sebab itu sebagai pembuat kebijakan yang dapat memenuhi hak dari warganya khususnya pekerja/buruh, maka pemerintah berperan penting dalam membantu masalah ketenagakerjaan agar hak dari warganya dapat terpenuhi dengan baik. Pengawasan terkait tenaga kerja diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Pengawasan pengupahan di PT. United Tractors oleh Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta?, (2) Apa saja faktor penghambat dalam hal pelaksanaan pengawasan pengupahan di PT. United Tractors?. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data skunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan.

Untuk memastikan upah yang telah diberikan oleh PT. United Tractors kepada para pekerjanya telah sesuai dengan aturan yang berlaku, ada beberapa kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta antara lain Pembinaan Pengawasan ketenagakerjaan, Pemeriksaan Ketenagakerjaan, Pengujian Ketenagakerjaan, dan Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Beberapa faktor penghambat dalam hal pelaksanaan pengawasan pengupahan di PT. United Tractors yaitu terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan, data yang diperlukan kurang lengkap, minimnya sarana dan anggaran yang diberikan pada pegawai pengawas ketenagakerjaan serta kondisi yang tidak memungkinkan antara pihak perusahaan dan pengawas ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Upah, Pengupahan, Pengawasan, Disnakertrans

ABSTRACT**SUPERVISION OF WORKER WAGES PT. UNITED TRACTORS BY DKI
JAKARTA MANPOWER DEPARTMENT**

**By
CITRA RAHMAYANTI**

In Indonesia, problems regarding employment are quite complex, starting from unilateral dismissal of work, inappropriate salaries or wages, underage employees, lack of freedom of association and so on. Therefore, as a policy maker who can fulfill the rights of its citizens, especially workers/laborers, the government plays an important role in assisting with employment issues so that the rights of its citizens can be fulfilled properly. Supervision related to labor is regulated in Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 Amendment to Regulation of the Minister of Manpower Number 33 of 2016 concerning Procedures for Labor Inspection.

The problems in this research are: (1) How are wages monitored at PT. United Tractors by the DKI Jakarta Manpower Department?, (2) What are the inhibiting factors in implementing wage monitoring at PT. United Tractors? This research uses a normative and empirical approach with primary data and secondary data, obtained from literature and field research.

To ensure the wages given by PT. United Tractors to its workers has complied with applicable regulations, there are several inspection activities carried out by labor inspectors from the DKI Jakarta Provincial Manpower Service, including Labor Inspection Development, Employment Inspection, Employment Testing, and Investigation of employment crimes. Several inhibiting factors in implementing wage monitoring at PT. United Tractors, namely the limited number of labor inspectors, the data required is incomplete, the lack of facilities and budget provided to labor inspectors and conditions that are not possible between the company and the labor inspectors.

Keywords : Wages, Remuneration, Supervision, Manpower and Transmigration Department